

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan pada awal penelitian, yaitu: “Bagaimana reaksi Indonesia terhadap aksi Ofensif Malaysia Berkaitan Dengan Pelanggaran Pada Perbatasan Wilayah Dan Klaim Budaya Indonesia oleh Malaysia?”. Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan konsep politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Pelaksanaan kewajiban untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional yang dicantumkan sebagai visi PLNRI harus dijalankan secara seimbang. Karena jika salah satunya saja gagal dilakukan oleh pemerintah, maka dapat menjadi kegagalan terhadap pelaksanaan PLN.

Politik Luar Negeri adalah sebuah langkah yang ditempuh suatu Negara demi pemenuhan kepentingan nasionalnya dengan mengerahkan segala kemampuan dan kekuasaannya. Hubungan erat antara politik luar negeri dengan kepentingan nasional suatu pemerintahan, masuk ke dalam kondisi dimana kepentingan nasional merupakan suatu hal yang ingin dicapai dengan berbagai cara. Kepentingan nasional yang dimaksud biasanya mengenai keamanan, kemakmuran atau kesejahteraan perekonomian dan stabilitas politik, ideologi, serta kebudayaan sebagai citra bangsa.

Sesuai dengan konsep tersebut, penulis akan menganalisa reaksi yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap aksi ofensif Malaysia dalam kasus pelanggaran pada perbatasan wilayah dan klaim budaya Indonesia oleh Malaysia.

Analisa dari penelitian ini menghasilkan gambaran mengenai pola – pola perilaku pemerintah RI dalam mengambil kebijakan untuk menangani konflik dengan Malaysia. Kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai tidak cepat tanggap dan tidak memberikan solusi yang efektif. Presiden SBY selaku kepala negara dianggap tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan tegas terhadap penanganan kasus dengan Malaysia.

Reaksi sebagai tindakan balasan dari pelanggaran perbatasan wilayah maupun klaim wilayah dan kebudayaan yang dilakukan presiden SBY selama ini hanya melalui pidato – pidato guna meredam protes – protes yang berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat dalam negeri tanpa adanya tindakan lebih lanjut. Selain pidato yang disampaikan oleh presiden, tindakan pemerintah Indonesia dalam bereaksi terhadap aksi ofensif Malaysia tersebut hanya melalui peringatan dan penyampaian keberatan melalui Nota Presiden maupun Nota protes yang disampaikan Kementerian.

Tidak adanya tindakan preventif seperti sanksi tegas yang mengharuskan Malaysia untuk berfikir kembali dalam melakukan klaim terhadap budaya milik Indonesia maupun melanggar perbatasan wilayah, menjadikan pemerintah Malaysia lebih santai dalam menanggapi kembali peringatan – peringatan yang disampaikan melalui Nota protes pemerintah RI. Respon penjelasan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia seringkali hanya berupa klarifikasi melalui pernyataan dari PM dan menteri Malaysia yang disampaikan melalui media maupun pertemuan bilateral Indonesia – Malaysia. Pemberian nota penjelasan

resmi pemerintah Malaysia sebagai balasan dari nota protes pemerintah RI juga sempat tidak diberikan sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Tidak adanya tindakan pasti dari presiden sebagai kepala negara dengan status pemegang kekuasaan tertinggi, telah membawa kegagalan bagi Indonesia dalam membuktikan kekuatannya sebagai negara berdaulat. Alasan demi menjaga hubungan baik bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang telah terbina selama puluhan tahun dan demi menjaga kestabilan regional tidak bisa lagi dijadikan batu sandungan bagi pemerintah dalam mengambil sanksi tegas bagi Malaysia. Dikarenakan permasalahan pelanggaran perbatasan, klaim wilayah, dan klaim budaya serta tindakan – tindakan yang dinilai melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Terlebih lagi, hal ini terjadi tidak hanya sekali saja namun terus meningkat angkanya dari tahun ke tahun khususnya selama periode pemerintahan presiden SBY.

Permasalahan tersebut dipastikan akan terus terjadi selama pemerintah tidak menangani permasalahan ini secara serius karena kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak efektif. Tindakan pencegahan yang bersifat sementara tidak dapat dilakukan karena masalah akan terus timbul, tetapi dengan tindakan apa yang diterapkan dalam menghadapi hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi kemungkinan berhentinya suatu masalah untuk terulang kembali.

Dalam menjalankan kewajiban negara yang terangkum dalam visi dan misi orientasi kebijakan politik luar negerinya pemerintah SBY selama ini terlalu

memfokuskan arah pandangan hanya kepada pemajuan sektor perekonomian dan citra Indonesia di mata global dalam keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum Internasional. Namun yang terjadi di dalam negeri pemerintah dipandang gagal dalam melindungi kepentingan nasional bangsa. Ketidak – puasan masyarakat terhadap pemerintahan presiden SBY yang dianggap hanya melakukan pencitraan diri dan tidak tegas sebagai kepala negara.

Upaya peningkatan diplomasi Indonesia yang direncanakan dalam visi PLNRI dengan jalur *Diplomasi Total* yang melibatkan seluruh komponen *stakeholder* dan memanfaatkan seluruh lini kekuatan (*multi-track diplomacy*) sebagai instrumen pelaksanaan diplomasi Indonesia tidak dibuktikan dalam menghadapi isu dengan Malaysia. Jika terus dibiarkan, Malaysia akan terus menjadikan Indonesia sebagai target tanpa perlawanan (*easy target*) yang dapat dipertanyakan kedaulatan negaranya dan kelayakannya sebagai negara berdaulat yang diakui oleh masyarakat internasional. Aksi – aksi ofensif Malaysia yang memandang rendah kekuatan negara Indonesia adalah ancaman nyata yang harus disadari oleh pemerintah RI.

Doktrin *Thousand Friend with Zero Enemy* yang dicetuskan oleh presiden SBY sebagai motto dari Kabinet Indonesia Bersatu tidak berarti dan terbukti gagal. Malaysia yang dianggap sebagai negara sahabat bagi Indonesia masih melakukan tindakan – tindakan yang dapat mengancam tidak hanya kedaulatan RI, tetapi juga keadaan kondusif di dalam negeri. Hal tersebut dapat memecah belah hubungan masyarakat dengan pemerintahan yang dapat mempengaruhi stabilitas dalam negeri. Minimnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahan

akan mengganggu pelaksanaan demokratisasi. Ketidak – puasan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan lebih lanjut seperti pemisahan diri suatu daerah dan konflik antara masyarakat dan aparat negara.

Agenda ASEAN dalam menjaga keharmonisan dan keadaan yang kondusif bagi kestabilan kawasan tidak dapat berjalan sebagaimana – mestinya dan sering menimbulkan banyak keraguan akan kegunaan dibentuknya ASEAN dari awal. Ketidak – mampuan me – mediasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu alasan keefektifan ASEAN dalam menjaga kestabilan kawasan. Sebagai salah satu *leading country* yang cukup berpengaruh perannya di ASEAN, seharusnya status tersebut dapat digunakan oleh Indonesia sebagai momentum unjuk kekuatan. ASEAN merupakan suatu forum regional yang dibentuk guna menjaga kestabilan kawasan dan sebagai sarana bagi negara – negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota untuk berkerja – sama membangun kesejahteraan perekonomian kawasan. Jika ASEAN hanya didedikasikan sebagai forum perdagangan dan perekonomian kawasan saja, pembentukan suatu organisasi khusus dikawasan bukanlah sesuatu yang sangat diperlukan.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui hubungan bilateral maupun multilateral antar negara tanpa keharusan adanya suatu badan yang mengakomodasi. Prinsip ASEAN yang non – intervensi dapat dipandang secara positif dan negatif. Pandangan positif prinsip tersebut adalah guna saling menjaga kepercayaan anggota satu dengan lainnya sebagai negara yang berdaulat dan memiliki kemampuan mengatasi masalah dalam negerinya. Pandangan negatif dari prinsip

ini adalah tidak dapat berjalannya suatu badan atau organisasi secara penuh karena ruang lingkupnya sangat dibatasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi antara negara – negara anggota.

Dengan prinsip non – intervensi berarti suatu pihak dalam hal ini negara, tidak memiliki keinginan terlibatnya negara lain dalam membantu menyelesaikan permasalahan dalam negerinya. Tujuan suatu forum atau organisasi dibentuk adalah untuk menjadi wadah bagi penyampaian aspirasi – aspirasi dan pendiskusan masalah yang perlu dituntaskan. Terlepas dari ketidak – efektifan peran ASEAN dalam menjaga keharmonisan dan kondisi yang kondusif antara negara – negara di kawasan, Indonesia dengan ini harus memperkuat kekuatan diplomasi negaranya.

Diplomat yang merupakan perwakilan negara dalam urusan luar negeri, dengan upaya pemantapan strategi dan pengimplementasian kebijakan luar negeri secara tepat, seharusnya dapat menjadi senjata bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan PLNRI – nya. Nilai – nilai pada ASEAN yang sering diimplementasikan sebagai basis politik luar negeri Indonesia dalam berhubungan dengan negara – negara berbatasan khususnya dalam konteks regional tidak dapat dijadikan acuan pasti bagi pemerintah Indonesia. Karena ASEAN tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wadah yang memiliki kualifikasi untuk penyelesaian konflik Indonesia dengan Malaysia yang berkepanjangan. ASEAN dipandang belum mampu memenuhi perannya dalam segi diplomasi preventif, menciptakan dan menjaga keharmonisan antara negara – negara berbatasan yang merupakan anggota ASEAN serta kawasan.

Hal ini merupakan tugas rumah bagi presiden dan kementerian di bawahnya untuk berani bertindak dengan mengerahkan seluruh kekuatan dalam melindungi kepentingan dalam negerinya. Karena sesungguhnya pelibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan sebuah konflik negara hanya boleh dilakukan sebagai pilihan akhir. Negara melalui kebijakan – kebijakan politik luar negerinya harus menjalankan kewajibannya dalam melindungi apa yang dimiliki negara dan mampu meraih sesuatu demi kemajuan dan kesejahteraan bangsanya secara seimbang. Dengan demikian negara dapat diakui kelayakan atas kedaulatannya. Kesigapan dan kepemilikan jiwa nasionalisme yang tinggi sebagai kepala negara dan pemerintah sebagai aparat yang bertugas melayani dan mengabdikan kepada bangsa harus dimiliki dan dikedepankan, terlebih permasalahan ini menyangkut harkat – martabat bangsa.

Masyarakat akan lebih dilecehkan jika semangat nasionalisme orang – orang yang terpilih dan dipercayakan rakyat sebagai pelaksana kebijakan negara dan yang mengatur negara Indonesia ini jauh lebih rendah dari yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian posisi pemerintahan harus dilakukan dengan akurasi yang tepat kepada orang – orang yang memang bersedia dan memiliki niat untuk mengabdikan diri sepenuhnya terhadap negara dan khalayaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Holsti, KJ. 1977. *International Politics A Framework for Analysis*. terjemahan (Wawan Juanda) Penerbit Binacipta. Bandung. 1992.

Jackson, Robert. H. and Sorensen Georg. 2010. *Introduction to International Relations Theories & Approaches*. Oxford University Press : New York. 4<sup>th</sup> Edition.

John W. Creswell. *Research Design Third Edition*. (SAGE: 2009).

Lentner. Howard H. 1974. *A Comparative and Conceptual Approach*. Baruch College. The City University of New York. Charles E. Merrill Publishing Company, A Bell & Howell Company. Columbus, Ohio.

Yusuf, Suffri. 1989. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri : sebuah analisis teoretis dan uraian tentang pelaksanaannya*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.

### Artikel Jurnal

Djalal, Hasjim. dkk. 2013. *Dispute between Indonesia and Malaysia on the Sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands*. Jurnal Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Volume 12.

Fachri, Yuli. 2013. *Politik Luar Negeri Malaysia Setelah Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 2002 Tentang Sipadan – Ligitan*. Jurnal Transnasional Vol.4 No.2.

Inayatullah, Benni. 2010. Menelusuri Konflik Indonesia – Malaysia: Persoalan Klaim Budaya. *The Indonesian Institute*. Jurnal Update Indonesia. Vol. V. No.6.

Jurnal Masyarakat & Budaya. 2011. *Analisis Dramaturgi Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Tentang Insiden Di Seputar Perairan Pulau Bintan Sebagai Pementasan*. Volume 13 No. 1 Tahun 2011. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI.

Sunarti, Linda. 2013. Menelusuri Akar Konflik Warisan Budaya antara Indonesia dengan Malaysia. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kenusiaan* 6 (1).

Wirawan, Mulya. dkk. *Deklarasi Solo, Upaya Penjagaan dan Perlindungan Warisan Budaya*. Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI. *Jurnal Opinio Juris*, Volume 01. Oktober 2009.

### **Dokumen Resmi**

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2010. *Indonesia Dan Malaysia Tingkatkan Kerjasama Bidang Ekonomi Dan Budaya*. <http://www.dpd.go.id/artikel-indonesia-dan-malaysia-tingkatkan-kerjasama-bidang-ekonomi-dan-budaya>

Kementerian Agama : *Pidato Presiden SBY pada 1 September 2010*. <http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/ZGVMYRnS1284427338.pdf>

Kementerian Luar Negeri RI. *Diplomasi Indonesia 2010 : Kegiatan Diplomasi dengan Malaysia*. <http://www.kemlu.go.id/Documents/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf>

Kementerian Luar Negeri RI. *Landasan, Visi, Misi Polugri*. 2010. <http://www.kemlu.go.id/kebijakan/landasan-visi-misi-polugri/default.aspx>

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2007. *Presiden : Indonesia – Malaysia Semakin Erat*. [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=128](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=128)

Pemerintah kota Yogyakarta. 2012. *Kota Yogyakarta dan Kota George Town Pulau Pinang Malaysia Tandatangani Kerjasama*.  
<http://www.jogjakota.go.id/news/kota-yogyakarta-dan-kota-george-town-pulau-pinang-malaysia-tandatangani-kerjasama>

Worldbank. Draft : *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2014*. Bab I.  
<http://documents.worldbank.org/curated/en/871851468042279485/text/682610WPOP11840order0Areas0201102014.txt>

### **Makalah**

GeorgeTown University Law Center. A Guide To The Basics Of International Law.  
<https://www.law.georgetown.edu/academics/academic-programs/legal-writing-scholarship/writing-center/upload/AGuidetotheBasicsofIntlLaw.pdf>

Bonarou, Christina. Dr. 2011. *Heritage Tourism & Museum Management, Lesson 2: Tourism, Heritage, & Heritage Tourism*. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece Department of Tourism Management. [http://www.tour.teithe.gr/get\\_file.php?f=393](http://www.tour.teithe.gr/get_file.php?f=393)

### **Artikel Majalah**

Kholid, M. dkk. 2009. *Hubungan RI – Malaysia Ibarat Menarik Rambut Dalam Tepung. Menlu RI: Media Jangan Cepat Memberitakan Sesuatu yang Faktanya Belum Jelas*. Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I bekerjasama dengan Pilar Indo Meditama. No. 24 Tahun II.  
<http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2009/DIPLOMASI%20Oktober%202009.pdf>

### **Website**

Amarullah, Amril dan Gustan, Edy. 2009. *"Indonesia – Malaysia Akan Kerjasama Pariwisata"*, Nasional News Viva.co.  
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/72486-indonesia-malaysia-akan-kerjasama-pariwisata>

- Beritasore Online. 2013. *Presiden SBY Terima PM Malaysia*. <http://beritasore.com/2013/12/19/presiden-sby-terima-pm-malaysia/>
- Beritasore online. Maret 2009. *Kasus Ambalat Cerminan Mendesak Pembangunan Perbatasan*. <http://beritasore.com/2009/06/04/kasus-ambalat-cermin-kelemahan-pusat-bangun-perbatasan/>
- Damayanti, Ninin. Nasional Tempo. Juni 2009. *KSAL : Tahun 2007, Malaysia Masuk Blok Ambalat 76 Kali*. <http://nasional.tempo.co/read/news/2009/06/03/078179827/ksal-tahun-2007-malaysia-masuk-batas-blok-ambalat-76-kali>
- Database Utama Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. <http://kbbi.web.id/klaim>
- Deil, Siska Amelie.F. dan Melani, Agustina. 2014. *Perusahaan Menengah RI Ingin Investasi di Malaysia*. <http://bisnis.liputan6.com/read/2024982/perusahaan-menengah-ri-ingin-investasi-di-malaysia>
- Deil, Siska Amelie.F. 2015. *Sukses Bangun Cipali, Malaysia Incar Proyek Tol Lain di RI*. Liputan6 Bisnis. <http://bisnis.liputan6.com/read/2252314/sukses-bangun-cipali-malaysia-incar-proyek-tol-lain-di-ri>
- Department of Political Science, University of Winconsin-Madison. 2009. *International relations*. <https://www.polisci.wisc.edu/fields/ir>
- Detik.com Finance. 2011. *Cikampek-Palimanan, Proyek Tol Malaysia Pertama di Indonesia*. <http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/1786140/cikampek-palimanan-proyek-tol-malaysia-pertama-di-indonesia?991101mainnews>
- Fibri, Rommy. Agustus 2009. *Tari Pendet Tayang, Protes Berbilang?.* *Liputan6 News Online*. <http://news.liputan6.com/read/241888/tari-pendet-tayang-protos-berbilang>

Hernasari, Putri Rizqi. 2012. *Jalin Kerjasama, Indonesia Akan Lakukan Kunjungan Ke Malaysia.* Detik Travel. <http://travel.detik.com/read/2012/04/20/153617/1897475/1025/>

Hernasari, Putri Rizqi. 2012. *Pasar Tanah Abang dan Bandung Jadi Incaran Turis Malaysia.* Detik Travel. <http://travel.detik.com/read/2012/04/20/160218/1897515/1025/pasar-tanah-abang-dan-bandung-jadi-incaran-turis-malaysia>

Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Online. 2012. *Malaysia Berani Klaim Budaya Indonesia Karena Pemerintahan SBY Tidak Tegas!.* <http://www.rmol.co/read/2012/06/18/67654/Malaysia-Berani-Klaim-Budaya-Indonesia-karena-Pemerintahan-SBY-Tidak-Tegas!->

Kodrat Setiawan. September 2009. *Malaysia Klaim dari Wayang sampai Pisang Goreng.* *Tempo.co* *Dunia.* <https://dunia.tempo.co/read/news/2009/09/28/118199680/malaysia-klaim-dari-wayang-sampai-pisang-goreng>

*Liputan6 News Online.* Juni 2012. *Terusik Lagi Klaim Negeri Jiran.* <http://news.liputan6.com/read/416067/terusik-lagi-klaim-negeri-jiran>

Medan Bisnis Daily. 2011. *Kini Giliran Malaysia Bangun Tol di Indonesia.* <http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2011/12/09/61871/kini-giliran-malaysia-bangun-tol-di-indonesia/>

Saptohutomo, Aryo Putranto. 2012. *Malaysia Merdeka Mudah Lewat Hadiah.* *Merdeka.com.* <https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-merdeka-mudah-lewat-hadiah.html>

Sugiyarto. 2012. *Perusahaan Malaysia Cari Lahan Sawit di Indonesia.* *Tribun News.* <http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/09/26/perusahaan-malaysia-cari-lahan-sawit-di-indonesia>

Syailendra, Prihandoko. Juni 2012. *Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengklaim Budaya RI.* *Nasional Tempo Online.* <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/06/21/078411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri>